

LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) PADA PENGADILAN TUN YOGYAKARTA

TRIWULAN I TAHUN 2024



 Jl. Janti No. 66, Banguntapan, Yogyakarta

 ptun-yogyakarta.go.id

 infoterpadu.ptunyogyakarta@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah yang Maha Kuasa, Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Triwulan I Tahun 2024 telah selesai sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan survei dalam rangka Peningkatan Efektifitas Pembangunan dan Evaluasi ZI menuju WBK/WBBM.

Pelaksanaan survei dilakukan selama periode 3 (tiga) bulan terakhir yaitu bulan Januari s.d. Maret 2024 dan merujuk pada :

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023.

Tujuan pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) adalah untuk memberikan gambaran perilaku anti korupsi secara umum pada setiap instansi pemerintah khususnya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta serta Unit Kerja ZI melalui Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK).

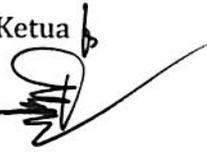
Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) terdiri dari 5 (lima) area yaitu:

1. Ada/tidaknya diskriminasi pelayanan.
2. Ada/tidaknya pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan.
3. Ada/tidaknya penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku.
4. Ada/tidaknya pungutan liar/pungli.
5. Ada/tidaknya percaloan/perantara tidak resmi.

Puji dan syukur kehadiran Allah yang Maha Kuasa, Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) telah selesai sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan survei dalam rangka Peningkatan Efektifitas Pembangunan dan Evaluasi ZI menuju WBK/WBBM.

Demikian disampaikan, mohon menjadi periksa.

Yogyakarta, 2 April 2024

↳ Ketua ↳

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.
NIP. 197608102000121001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
BAB I KUESIONER SURVEI	6
BAB II METODELOGI SURVEI.....	9
A. KRITERIA RESPONDEN	9
B. METODE PENCACAHAN	9
C. METODE PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS	10
1. Pengolahan Data	10
2. Skala Pengukuran.....	10
3. Metode Pengolahan Data Survei.....	11
BAB III PENGOLAHAN SURVEI	15
A. Analisis Hasil Survei	15
1. Tahapan Pelaksanaan Survei.....	15
2. Survei Persepsi Anti Korupsi.....	19
B. Tindak Lanjut Hasil Survei	25
BAB IV DATA SURVEI	27
A. Data Responden	27
B. Data Dukung Lainnya	29

DAFTAR TABEL

TABLE 1 PERSEPSI, INTERVAL SPAK, INTERVAL KONVERSI SPAK, MUTU PELAYANAN DAN KINERJA UNIT PELAYANAN	12
TABLE 2 NILAI TINGKAT KEPUASAN	14
TABLE 3 UJI VALIDITAS DAN REABILITAS HASIL SURVEI	16
TABLE 4 DISTRIBUSI NILAI R TABEL SIGNIFIKANSI 5% DAN 1%.....	18
TABLE 5 UJI RELIABILITAS CRONBACH'S ALPHA	19
TABLE 6 PENGOLAH HASIL DATA SURVEI.....	20
TABLE 7 PERSEPSI RESPONDEN.....	21
TABLE 8 PERSEPSI RESPONDEN.....	22
TABLE 9 PERSEPSI RESPONDEN.....	23
TABLE 10 PERSEPSI RESPONDEN	23
TABLE 11 PERSEPSI RESPONDEN	24
TABLE 12 NILAI PERSEPSI SETIAP UNSUR PELAYANAN	25

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 USIA RESPONDEN	27
GAMBAR 2 JENIS KELAMIN RESPONDEN.....	28
GAMBAR 3 TINGKAT PENDIDIKAN RESPONDEN	28
GAMBAR 4 RESPONDEN TERKAIT LAYANAN	29

BAB I KUESIONER SURVEI



Data Responden

* Nama Lengkap

* Jenis Kelamin

Pria

Wanita

* Usia

* No Telepon/HP

Alamat email

* Alamat Domisili

0 + 20000

* Pekerjaan

— Select —

* Pendidikan

— Select —

* SATKER YANG DISURVEI

— Select —

Berikutnya



Survei Persepsi Anti Korupsi

Persepsi & Kepuasan Terhadap Kebijakan mengenai Persepsi Korupsi

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak Setuju
- Cukup Setuju
- Sangat Setuju
- Sangat Sangat Setuju

* 1 Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini.

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena faktor suku, agama, keberagaman aliameter dan sejenisnya.

* 2 Tidak ada pelayanan diluar prosedur keurangan pelayanan pada unit layanan ini.

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan keurangan seperti penyebutan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat prosedur, pengurangan denda, dll.

* 3 Tidak ada penerimaan imbalan uang barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini.

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang menerima imbalan berupa uang untuk alasan administrasi, transport, rokok kopi dll di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan, jasa, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan dll diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi hotel, resort, perjalanan, jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll diluar ketentuan.

* 4 Tidak ada pungutan dan pungli pada unit layanan ini.

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang melakukan pungli yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi. Pungli parcel. Bias dikamufласakan melalui berbagai istilah, seperti "uang administrasi", "uang rokok", "uang terimakasih", dsl.

* 5 Tidak ada peralihan perantara tidak resmi pada unit layanan ini.

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang melakukan peralihan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini maupun pihak luar yang memiliki hubungan atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai.

Selanjutnya

Selesai



Terimakasih telah berpartisipasi untuk membangun Pengadilan yang lebih baik

KUESIONER SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)

Kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait kualitas dan integritas pemberian pelayanan pada unit layanan ini. Berilah nilai bintang antara 1-6 pada setiap pernyataan, dimana semakin banyak bintang menunjukkan bahwa Bapak/Ibu semakin setuju bahwa kualitas pelayanan pada unit layanan ini semakin baik.

Pertanyaan terkait Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya).

2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.

3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transpor, rokok, kopi, di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) diluar ketentuan.

4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (Pungli bisa dikamufleskan melalui berbagai istilah seperti "uang administrasi", "uang rokok", "uang terima kasih", dsb).

5. Tidak ada percaloan/perantaraidak resmi pada unit layanan ini

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada praktik percaloan (Pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/ atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai)

BAB II

METODELOGI SURVEI

A. KRITERIA RESPONDEN

Survei Persepsi Anti Korupsi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta awal tahun 2023 menargetkan pengguna layanan yang menerima layanan pada bulan Januari s.d. Maret 2024. Pengumpulan data dilakukan menggunakan google form dengan tautan [SURVEI PELAYANAN PUBLIK](#) yang tertaut pada website Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023, bahwa penerima Layanan yang dapat mengisi survei adalah:

1. Para Pihak yang pernah berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.
2. Mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi yang pernah menerima layanan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.
3. Dosen dari berbagai Perguruan Tinggi yang pernah menerima layanan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

B. METODE PENCACAHAN.

Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu responden mengisi sendiri kuesioner yang telah disiapkan dalam bentuk tautan yang telah disematkan pada website Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan tujuan untuk menggali informasi terkait layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang telah diterima oleh para responden. Melalui tautan tersebut, responden dapat mengakses secara langsung dan mengisi kuesioner yang telah disiapkan.

C. METODE PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS

1. Pengolahan Data.

Metode data survei adalah dengan metode kuantitatif karena data berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik untuk melakukan pengukuran yang akurat terhadap sesuatu.

Teknik pengumpulan data melalui kuesioner dan pengumpulan data dengan rentang waktu bulan Januari s.d. Maret 2024. Subyek survei adalah orang yang pernah menerima layanan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Adapun untuk proses pengolahan dan analisis data, alur kerjanya, yang dimulai dari pengumpulan hingga interpretasi data dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini :

a) Pengumpulan Data

Sebelum melakukan pengolahan data, ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Sedangkan setelah analisis data yaitu suatu proses penyederhanaan data, maka dapat dilakukan interpretasi data dengan mudah.

b) Koding Data

Proses pengkodean data dilakukan setelah hasil survei terkumpul.

c) Pengolahan Data

Paling tidak ada dua hal yang perlu dilakukan ketika melakukan pengolahan data: (1) Entry data, atau memasukan data dalam proses tabulasi. (2) Melakukan editing ulang terhadap data yang telah ditabulasi untuk mencegah terjadinya kekeliruan memasukan data, atau kesalahan penempatan dalam kolom maupun baris tabel.

2. Skala Pengukuran

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Likert. Skala likert merupakan jenis skala yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian (fenomena sosial spesifik), seperti sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang.

Variabel penelitian yang diukur dengan skala likert ini, dijabarkan menjadi indikator variabel yang kemudian dijadikan titik tolak penyusunan item-item instrumen, bisa berbentuk pertanyaan atau pernyataan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Kuesioner untuk setiap variabel dalam penelitian ini merupakan jenis kuesioner tertutup, dengan metode pengukuran skala semantik diferensial rasio 1 sampai 6.
- b) Untuk mengukur indikator kinerja/kepuasan skala rasio yang digunakan adalah nilai 1 (Sangat Tidak Puas) sampai dengan nilai 6 (Sangat Puas).

Analisis data untuk menentukan Index Persepsi Anti Korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 - 6. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 6 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani. Data survei Index Persepsi Anti Korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan Index Persepsi Anti Korupsi atas pelayanan yang diberikan di setiap tri wulannya. Teknik analisis perhitungan Index Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a) *Pertama*, menentukan jumlah total skor/jumlah bintang dari masing-masing indikator yang digunakan dalam survei ini.
- b) *Kedua*, mencari jumlah skor/jumlah bintang tertinggi setiap indikator.
- c) *Ketiga*, membagi jumlah total skor/jumlah bintang dari masing-masing indikator dibagi jumlah skor/jumlah bintang tertinggi setiap indikator dikali 4 (empat).

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 - 6 yang kemudian dikonversikan ke angka 0 - 100. Skala Index Persepsi Korupsi antara 1 - 6 yang artinya mendekati nilai 4 maka Index Persepsi Anti Korupsi Sangat Bersih.

3. Metode Pengolahan Data Survei.

Kuesioner yang telah diisi kemudian dikumpulkan dan diolah secara kuantitatif dengan menggunakan aplikasi Microsoft excel. Proses dan analisis data sesuai dengan petunjuk dalam Keputusan MENPAN Nomor 14 Tahun 2017, sehingga sudah sesuai dengan standar nasional. Survei Persepsi Anti Korupsi dapat dilakukan penyesuaian dengan kondisi spesifik unit/lembaga pelayanan yang bersangkutan, selanjutnya data diolah dengan uji statistik untuk memperoleh informasi yang lebih baik terhadap data yang didapat sehingga hasil survei dapat lebih bermanfaat.

a) Metode Pengolahan Data.

Untuk memperoleh nilai SPAK unit pelayanan, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai SPAK} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi semua unsur} \times 4}{\text{Total nilai semua unsur maksimum}}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SPAK yaitu antara skala 1-100%, maka hasil penilaian tersebut di atas dibagi 4 dan dikalikan 100%, dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ SPAK} = \frac{\text{Nilai SPAK}}{4} \times 100\%$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

- 1) Menambah unsur yang dianggap relevan.
- 2) Memberikan bobot yang berbeda terhadap 5 (lima) unsur yang dominan dalam unit pelayanan.

Table 1 Persepsi, Interval SPAK, Interval Konversi SPAK, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SPKP	NILAI INTERVAL KONVERSI SPKP	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	Kurang Memuaskan
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Cukup Memuaskan
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Memuaskan
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Sangat Memuaskan

b) Perangkat Pengolah Data.

- 1) Pengolah Data Dengan Komputer

Data *entry* dan penghitungan survei dapat dilakukan dengan program computer/system data base (Microsoft excel).

2) Mengolah Data Secara Manual

2.1) Data isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari pertanyaan 1 sampai dengan 5.

2.2) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai survei unit pelayanan adalah sebagai berikut:

2.2.1) Nilai rata-rata per unsur pelayanan.

Nilai masing-masing pertanyaan terkait pelayanan dijumlahkan (kebawah) sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Untuk mendapatkan nilai rata-rata per pertanyaan, masing-masing pertanyaan unsur pelayanan dilakukan penghitungan:

Nilai akhir hasil SPAK dikonversikan ke dalam bentuk Indeks Persepsi Anti Korupsi dengan skala 4 menggunakan rumus berikut:

$$\text{Nilai SPAK} = (\text{jumlah bintang per unsur} / \text{Skor Maksimum per unsur}) \times 4$$

Untuk nilai persentasenya menggunakan rumus berikut:

$$\text{Persentase SPAK} = (\text{Nilai SPAK per unsur} / 4) \times 100\%$$

2.2.2) Nilai survei Anti Korupsi

Nilai akhir hasil SPAK dikonversikan ke dalam bentuk Indeks Persepsi Anti Korupsi dengan skala 4 menggunakan rumus berikut:

$$\text{Nilai SPAK} = (\text{jumlah bintang semua unsur} / \text{Skor Maksimum Semua unsur}) \times 4$$

Untuk nilai persentasenya menggunakan rumus berikut:

$$\text{Persentase SPAK} = (\text{Nilai SPAK} / 4) \times 100\%$$

c) Pengujian Kualitas Data.

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin dan pendidikan terakhir. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan jawaban yang diberikan, sebagai bahan analisis objektivitas.

Instrumen penelitian yang menggunakan skala likert ini akan dibuat dalam bentuk jumlah bintang, nilai bintang antara 1-6 pada setiap pernyataan, dimana semakin banyak bintang menunjukkan bahwa semakin setuju kualitas pelayanan pada

unit layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta semakin baik.

Table 2 Nilai Tingkat Kepuasan

Tingkat Kepuasan / Kenyataan Kinerja	Nilai / Skor Analisis kuantitatif
Sangat Setuju	6
Setuju	5
Cukup Setuju	4
Kurang Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Untuk membuat skala likert dapat digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan sejumlah pernyataan yang sesuai dengan sikap yang akan diukur dan dapat diidentifikasi dengan jelas (positif atau negatif)
- 2) Memberikan pernyataan-pernyataan tersebut kepada kelompok responden untuk diisi dengan lengkap, jelas dan benar.
- 3) Respon dari setiap pertanyaan dihitung dengan cara menjumlahkan bintang dari setiap pertanyaan serupa, sehingga respon yang berada pada posisi yang sama akan menerima secara konsisten nilai angka yang selalu sama. Misalnya, bernilai 6 untuk sangat positif dan bernilai 1 untuk sangat negatif.
- 4) Hasil hitung akan mendapatkan skor tiap-tiap pernyataan dan skor total, baik untuk setiap responden maupun secara total untuk seluruh responden

Dimana penilaian skala tersebut sebagai hasil persentase akhir penelitian nanti akan dikategorisasikan menurut nilai interval dan level hasil penilaian.

d) Tahap Pembuatan Laporan Survei

Penyusunan Laporan Kegiatan pengukuran Survei dalam rangka penyusunan Indeks Persepsi Anti Korupsi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Periode Triwulan I Tahun 2024 didokumentasikan dalam bentuk laporan, sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

BAB III PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

Pelaksanaan e-Survei dilakukan dari bulan Januari s.d. Maret 2024, dengan memberikan informasi e-Survei kepada pengguna layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, dengan mekanisme menyampaikan link SURVEI PELAYANAN PUBLIK secara langsung, maupun penyebaran link Survei melalui Whats App, SMS ataupun email calon responden.

Responden dapat mengisi e-Survei persepsi anti korupsi terhadap pelayanan baik melalui komputer/laptop/smartphone. Sebelum menjawab e-Survei, maka responden harus mengisi data-data pribadi yang terdiri dari alamat email, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan pekerjaan.

Untuk mengetahui tingkat Indek Persepsi Anti Korupsi (SPAK), maka responden diharapkan dapat memberikan penilaian yang obyektif dari berbagai indikator yang ada dalam e-Survei. Adapun indikator-indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini
2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini
3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini
4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini
5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini

1. Tahapan Pelaksanaan Survei

Survei indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dilakukan melalui metode penelitian kuantitatif dengan menyebarkan elektronik kuesioner (e-Survei) sebagai alat pengumpul data kepada pengguna jasa layanan (responden). Adapun tahapan Survei adalah sebagai berikut :

a) Tahap Persiapan

- 1) Membuat daftar pertanyaan pada kuesioner untuk Survei SPAK tahun 2024 sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan reformasi Birokrasi Nomor

04 Tahun 2023 tentang Pengusulan Dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2023.

2) Menentukan jumlah responden yang akan di Survei.

b) Tahap Pelaksanaan Survei

1) Tahap Proses Pengumpulan Data.

Pelaksanaan e-Survei dilakukan dari bulan Januari s.d. Maret 2024, dengan melakukan penyebaran e-Survei kepada pengguna layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, dengan mekanisme menyampaikan link SURVEI PELAYANAN PUBLIK secara langsung, maupun penyebaran link Survei melalui Whats App, SMS ataupun email calon responden.

2) Tahap Proses Validasi Data

Melakukan pengecekan secara berkala pada sistem e-Survei untuk mengetahui perkembangan e-Survei dari bulan Januari s.d. Maret 2024. Survei dari data valid Responden sejumlah 30 Responden dan untuk selanjutnya data yang sudah terkumpul dilakukan proses validasi data dengan hasil sebagai berikut :

2.1) Uji Validitas

Uji validitas atau kesahihan adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur, berikut hasil perhitungan uji validitas hasil survei terhadap Pengguna layanan Publik Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Table 3 Uji Validitas dan Reabilitas Hasil Survei

UJI VALIDITAS DAN REABILITAS HASIL SURVEI						
Variabel X						
Responden	P1	P2	P3	P4	P5	Total
1	6	6	6	6	6	30
2	6	6	6	6	6	30
3	6	6	6	6	6	30
4	6	6	6	6	6	30
5	6	6	5	5	5	27
6	6	6	6	6	6	30
7	6	6	6	6	6	30
8	6	6	6	6	6	30
9	6	6	6	6	6	30
10	5	6	6	5	6	28
11	6	6	6	6	6	30
12	6	6	6	6	6	30
13	6	6	6	6	6	30

14	6	6	6	6	6	30
15	5	5	5	5	5	25
16	5	5	6	6	6	28
17	6	6	6	6	6	30
18	6	6	6	6	6	30
19	6	6	6	6	6	30
20	6	6	6	6	6	30
21	5	6	5	5	6	27
22	6	6	6	6	6	30
23	5	5	6	6	5	27
24	6	6	6	6	6	30
25	6	6	6	6	6	30
26	6	6	5	6	6	29
27	5	6	6	6	6	29
28	6	6	6	6	6	30
29	6	6	6	6	6	30
30	6	6	6	6	6	30
R Hitung	0,785	0,698	0,719	0,796	0,785	880
R Tabel	0,349	0,349	0,349	0,349	0,349	
Keterangan Validitas	valid	valid	valid	valid	valid	
Varian Data	0,166	0,093	0,120	0,120	0,093	0,591
						1,678
Nilai Cronbac"s alpha						0,81
Nilai Acuan						0,70
Kesimpulan :						REALIABLE
(Jika Nilai Cronbac"s alpha > 0,70 maka REALIABLE, Jika Nilai Cronbac"s alpha < 0,70 maka tidak REALIABLE)						

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *r hitung* untuk pernyataan Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini sebesar 0,785; pernyataan Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini sebesar 0,698; pernyataan Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini sebesar 0,719; Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini sebesar 0,796; Tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada unit layanan ini sebesar 0,785;

Nilai *r tabel* sebesar 0,349; nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai *r hitung* untuk seluruh indeks pelayanan publik memiliki nilai *r hitung* yang lebih besar daripada *r tabel*, oleh sebab itu dapat diketahui bahwa seluruh indeks tersebut VALID.

Table 4 Distribusi Nilai r Tabel Signifikansi 5% dan 1%

Tabel r Product Moment
Pada Sig.0,05 (Two Tail)

N	r	N	r	N	r	N	r	N	r	N	r
1	0.997	41	0.301	81	0.216	121	0.177	161	0.154	201	0.138
2	0.95	42	0.297	82	0.215	122	0.176	162	0.153	202	0.137
3	0.878	43	0.294	83	0.213	123	0.176	163	0.153	203	0.137
4	0.811	44	0.291	84	0.212	124	0.175	164	0.152	204	0.137
5	0.754	45	0.288	85	0.211	125	0.174	165	0.152	205	0.136
6	0.707	46	0.285	86	0.21	126	0.174	166	0.151	206	0.136
7	0.666	47	0.282	87	0.208	127	0.173	167	0.151	207	0.136
8	0.632	48	0.279	88	0.207	128	0.172	168	0.151	208	0.135
9	0.602	49	0.276	89	0.206	129	0.172	169	0.15	209	0.135
10	0.576	50	0.273	90	0.205	130	0.171	170	0.15	210	0.135
11	0.553	51	0.271	91	0.204	131	0.17	171	0.149	211	0.134
12	0.532	52	0.268	92	0.203	132	0.17	172	0.149	212	0.134
13	0.514	53	0.266	93	0.202	133	0.169	173	0.148	213	0.134
14	0.497	54	0.263	94	0.201	134	0.168	174	0.148	214	0.134
15	0.482	55	0.261	95	0.2	135	0.168	175	0.148	215	0.133
16	0.468	56	0.259	96	0.199	136	0.167	176	0.147	216	0.133
17	0.456	57	0.256	97	0.198	137	0.167	177	0.147	217	0.133
18	0.444	58	0.254	98	0.197	138	0.166	178	0.146	218	0.132
19	0.433	59	0.252	99	0.196	139	0.165	179	0.146	219	0.132
20	0.423	60	0.25	100	0.195	140	0.165	180	0.146	220	0.132
21	0.413	61	0.248	101	0.194	141	0.164	181	0.145	221	0.131
22	0.404	62	0.246	102	0.193	142	0.164	182	0.145	222	0.131
23	0.396	63	0.244	103	0.192	143	0.163	183	0.144	223	0.131
24	0.388	64	0.242	104	0.191	144	0.163	184	0.144	224	0.131
25	0.381	65	0.24	105	0.19	145	0.162	185	0.144	225	0.13
26	0.374	66	0.239	106	0.189	146	0.161	186	0.143	226	0.13
27	0.367	67	0.237	107	0.188	147	0.161	187	0.143	227	0.13
28	0.361	68	0.235	108	0.187	148	0.16	188	0.142	228	0.129
29	0.355	69	0.234	109	0.187	149	0.16	189	0.142	229	0.129
30	0.349	70	0.232	110	0.186	150	0.159	190	0.142	230	0.129
31	0.344	71	0.23	111	0.185	151	0.159	191	0.141	231	0.129
32	0.339	72	0.229	112	0.184	152	0.158	192	0.141	232	0.128
33	0.334	73	0.227	113	0.183	153	0.158	193	0.141	233	0.128
34	0.329	74	0.226	114	0.182	154	0.157	194	0.14	234	0.128
35	0.325	75	0.224	115	0.182	155	0.157	195	0.14	235	0.127
36	0.32	76	0.223	116	0.181	156	0.156	196	0.139	236	0.127
37	0.316	77	0.221	117	0.18	157	0.156	197	0.139	237	0.127
38	0.312	78	0.22	118	0.179	158	0.155	198	0.139	238	0.127
39	0.308	79	0.219	119	0.179	159	0.155	199	0.138	239	0.126
40	0.304	80	0.217	120	0.178	160	0.154	200	0.138	240	0.126

Catatan :

$r_{0,05}$ atau derajat kebebasan sebesar 5 % atau tingkat keyakinan 95%.

2.2) Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas Reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Pada table 6 Uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,81 atau 81% dimana lebih besar dari nilai minimal Cronbach alpha 0.70, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument yang digunakan untuk mengukur indeks pelayanan publik bersifat reliabel.

Table 5 Uji Reliabilitas Cronbach's Alpha

Nilai Acuan	Nilai Cronbac"s alpha	Kesimpulan
0,70	0,81	REALIABLE

2. Survei Persepsi Anti Korupsi

Setelah dilakukan uji validasi dan reliabilitas terhadap data indeks kepuasan masyarakat, maka selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif dan perhitungan indeks kepuasan masyarakat. Kuesioner yang telah diisi kemudian dikumpulkan dan diolah secara kuantitatif dengan menggunakan aplikasi Microsoft excel. Proses dan analisis data sesuai dengan petunjuk dalam SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan Dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2023 dan Keputusan MENPAN Nomor 14 Tahun 2017, sehingga sudah sesuai dengan standar nasional.

Survei Persepsi Anti Korupsi dapat dilakukan penyesuaian dengan kondisi spesifik unit/lembaga pelayanan yang bersangkutan, selanjutnya data diolah dengan uji statistik untuk memperoleh informasi yang lebih baik terhadap data yang didapat sehingga hasil survei dapat lebih bermanfaat. Berikut Tabel hasil pengolahan data survei dengan sistem penghitungan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023. Untuk mendapatkan nilai rata-rata per pertanyaan, masing-masing pertanyaan unsur pelayanan dilakukan penghitungan:

Nilai akhir hasil SPAK dikonversikan ke dalam bentuk Indeks Persepsi Anti Korupsi dengan skala 4 menggunakan rumus berikut:

$$\text{Nilai SPAK} = (\text{jumlah bintang per unsur} / \text{Skor Maksimum per unsur}) \times 4$$

Untuk nilai persentasenya menggunakan rumus berikut:

$$\text{Persentase SPAK} = (\text{Nilai SPAK per unsur} / 4) \times 100\%$$

Untuk selanjutnya, Instrumen yang disebarakan kepada 30 responden telah terisi dengan baik, sehingga dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut. Indeks persepsi anti korupsi masyarakat memiliki skala antara 1 yang artinya sangat tidak puas sampai dengan 6 yang artinya sangat puas. Indeks tersebut mengukur persepsi anti korupsi masyarakat terhadap pelayanan pada sektor

publik yang dalam hal ini adalah pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Berikut ini nilai rata-rata per indikator indeks persepsi anti korupsi masyarakat terhadap layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Table 6 Pengolah Hasil Data Survei

Pengolah Hasil Data Survei SPAK						
Variabel X						
Responden		U 1	U 2	U 3	U 4	U 5
RES	1	6	6	6	6	6
RES	2	6	6	6	6	6
RES	3	6	6	6	6	6
RES	4	6	6	6	6	6
RES	5	6	6	5	5	5
RES	6	6	6	6	6	6
RES	7	6	6	6	6	6
RES	8	6	6	6	6	6
RES	9	6	6	6	6	6
RES	10	5	6	6	5	6
RES	11	6	6	6	6	6
RES	12	6	6	6	6	6
RES	13	6	6	6	6	6
RES	14	6	6	6	6	6
RES	15	5	5	5	5	5
RES	16	5	5	6	6	6
RES	17	6	6	6	6	6
RES	18	6	6	6	6	6
RES	19	6	6	6	6	6
RES	20	6	6	6	6	6
RES	21	5	6	5	5	6
RES	22	6	6	6	6	6
RES	23	5	5	6	6	5
RES	24	6	6	6	6	6
RES	25	6	6	6	6	6
RES	26	6	6	5	6	6
RES	27	5	6	6	6	6
RES	28	6	6	6	6	6
RES	29	6	6	6	6	6
RES	30	6	6	6	6	6
Jumlah		174	177	176	176	177
Skor Maxs		180	180	180	180	180
Nilai SPAK Per Unsur		3,87	3,93	3,91	3,91	3,93

Skala 100	96,67	98,33	97,78	97,78	98,33
NILAI INTERVAL KONVERSI SPAK					97,8
NILAI INTERVAL SPAK					3,9

Berikut persepsi responden mengenai indikator pelayanan publik terkait dengan persepsi anti korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang diukur pada bulan Januari s.d. Maret 2024.

- a. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya).

Table 7 Persepsi Responden

Tingkat Kepuasan	Skor / Jumlah Bintang	Jumlah Responden	Prosentase
Sangat Setuju	6	24	80%
Setuju	5	6	20%
Cukup Setuju	4	0	0
Kurang Setuju	3	0	0
Tidak Setuju	2	0	0
Sangat Tidak Setuju	1	0	0

Tabel tersebut menunjukkan hampir sebagian besar (80%) Pemakai layanan Publik Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menyatakan bahwa tidak ada diskriminasi pelayanan menyatakan sangat setuju, dan terdapat 20% responden yang berpendapat bahwa tidak ada diskriminasi pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta memberikan jawaban setuju;

Berdasarkan tabel Pengolah Hasil Data Survei, hasil persepsi responden memperlihatkan bahwa pelayanan yang dilakukan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta terkait dengan tidak ada diskriminasi pelayanan sebagian besar menyatakan sangat setuju, hal ini ditunjukkan dengan hasil survei persepsi anti korupsi untuk unsur tersebut sebesar 3,87 atau sebesar 96,67% atau dengan kata lain sangat bersih.

b. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.

Table 8 Persepsi Responden

Tingkat Kepuasan	Skor / Jumlah Bintang	Jumlah Responden	Prosentase
Sangat Setuju	6	27	90%
Setuju	5	3	10%
Cukup Setuju	4	0	0%
Kurang Setuju	3	0	0%
Tidak Setuju	2	0	0%
Sangat Tidak Setuju	1	0	0%

Tabel tersebut menunjukkan hampir sebagian besar (90%) Pemakai layanan Publik Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menyatakan bahwa tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan menyatakan sangat setuju, dan terdapat 10% responden yang berpendapat bahwa tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan yang memberikan pendapat setuju. Berdasarkan tabel Pengolah Hasil Data Survei, hasil persepsi responden memperlihatkan bahwa pelayanan yang dilakukan telah diterapkan di Pengadilan Tata Usaha negara Yogyakarta terkait dengan tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan sebagian besar menyatakan sangat setuju, hal ini ditunjukkan dengan hasil survei persepsi anti korupsi untuk unsur tersebut sebesar 3,93 atau 98,33% atau dengan kata lain sangat bersih.

c. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transport, rokok, kopi, di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) diluar ketentuan.

Table 9 Persepsi Responden

Tingkat Kepuasan	Skor / Jumlah Bintang	Jumlah Responden	Prosentase
Sangat Setuju	6	26	87%
Setuju	5	4	13%
Cukup Setuju	4	0	0%
Kurang Setuju	3	0	0%
Tidak Setuju	2	0	0%
Sangat Tidak Setuju	1	0	0%

Tabel tersebut menunjukkan hampir sebagian besar (87%) Pemakai layanan Publik Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menyatakan bahwa tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku menyatakan sangat setuju, dan terdapat 13% responden yang berpendapat bahwa tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pengguna layanan memberikan respon setuju.

Berdasarkan tabel Pengolah Hasil Data Survei, hasil persepsi responden memperlihatkan bahwa pelayanan yang dilakukan telah diterapkan di Pengadilan Tata Usaha negara Yogyakarta terkait respon Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku sebagian besar menyatakan sangat setuju, hal ini ditunjukkan dengan hasil survei persepsi anti korupsi untuk unsur tersebut sebesar 3,91 atau 97,78% atau dengan kata lain sangat bersih.

d. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (Pungli bisa dikamufleskan melalui berbagai istilah seperti “uang administrasi”, “uang rokok” , “uang terima kasih” , dsb).

Table 10 Persepsi Responden

Tingkat Kepuasan	Skor / Jumlah Bintang	Jumlah Responden	Prosentase
Sangat Setuju	6	26	87%
Setuju	5	4	13%
Cukup Setuju	4	0	0%
Kurang Setuju	3	0	0%

Tidak Setuju	2	0	0%
Sangat Tidak Setuju	1	0	0%

Tabel tersebut menunjukkan sebagian besar (87%) Pemakai layanan Publik Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menyatakan bahwa tidak ada pungutan liar (pungli) yang menyatakan sangat setuju, dan terdapat 13% responden yang berpendapat bahwa tidak ada pungutan liar (pungli) pengguna layanan yang memberikan respon setuju.

Berdasarkan tabel Pengolah Hasil Data Survei, hasil persepsi responden memperlihatkan bahwa pelayanan yang telah diterapkan di Pengadilan Tata Usaha negara Yogyakarta terkait Tidak ada pungutan liar (pungli) sebagian besar menyatakan sangat setuju, hal ini ditunjukkan dengan hasil survei persepsi anti korupsi untuk unsur tersebut sebesar 3,91 atau 97,78% atau dengan kata lain sangat bersih.

e. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada praktik percaloan (Pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai).

Table 11 Persepsi Responden

Tingkat Kepuasan	Skor / Jumlah Bintang	Jumlah Responden	Prosentase
Sangat Setuju	6	27	90%
Setuju	5	3	10%
Cukup Setuju	4	0	0%
Kurang Setuju	3	0	0%
Tidak Setuju	2	0	0%
Sangat Tidak Setuju	1	0	0%

Tabel tersebut menunjukkan hampir sebagian besar (90%) Pemakai layanan Publik Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menyatakan bahwa Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi yang menyatakan sangat setuju, namun terdapat 10% responden yang berpendapat bahwa tidak ada percaloan/perantara tidak resmi dalam pelayanan pengguna layanan memberikan respon setuju.

Berdasarkan tabel Pengolah Hasil Data Survei, hasil persepsi responden memperlihatkan bahwa pelayanan yang telah diterapkan di Pengadilan Tata Usaha negara Yogyakarta terkait Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi sebagian besar menyatakan sangat setuju, hal ini ditunjukkan dengan hasil survei persepsi anti korupsi untuk unsur tersebut sebesar 3,93 atau 98,33% atau dengan kata lain sangat bersih.

Berdasarkan hasil penghitungan Survei Persepsi Anti Korupsi tersebut diatas, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Berikut hasil rekapitulasi nilai unsur layanan dan nilai unsur unit pelayanan yang diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan sebagaimana tabel berikut:

Table 12 Nilai Persepsi Setiap Unsur Pelayanan

NO.	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PERSEPSI	PREDIKAT
1	Tidak ada diskriminasi pelayanan	3,87	Sangat Bersih
2	Tidak ada pelayanan diluar prosedur	3,93	Sangat Bersih
3	Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas	3,91	Sangat Bersih
4	Tidak ada pungutan liar	3,91	Sangat Bersih
5	Tidak ada percaloan	3,93	Sangat Bersih
Nilai Persepsi Seluruh Unsur Pelayanan		3,90	Sangat Bersih
Nilai Persepsi Seluruh Unsur Skala 100		97,8	

B. Tindak Lanjut Hasil Survei

Dari Hasil survei persepsi anti korupsi pada layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta periode Januari s.d. Maret 2024, diketahui bahwa unsur pelayanan tidak ada pelayanan di luar prosedur dan unsur pelayanan tidak ada percaloan merupakan unsur yang mendapatkan penilaian tertinggi yaitu dengan penilaian 3,93. Secara umum seluruh unsur layanan mendapat nilai SANGAT BERSIH pada rentang nilai 3,87–3,93. Meskipun dilihat dari keseluruhan penilaian persepsi tidak ada penilaian kurang, namun Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tetap memperhatikan pelayanan pada nilai yang terendah dari hasil survei ini yaitu pada kategori tidak ada diskriminasi pelayanan dengan nilai indek 3,87, dan tetap perlu

untuk lebih ditingkatkan, dengan cara terus menghimbau kepada seluruh Pegawai agar melayani masyarakat tanpa diskriminasi dan melaksanakan pelayanan yang terbaik bagi seluruh pengguna layanan, serta meningkatkan pengawasan, dan rencana perbaikan ini dapat dilaksanakan atau ditindaklanjuti pada triwulan berikutnya.

BAB IV DATA SURVEI

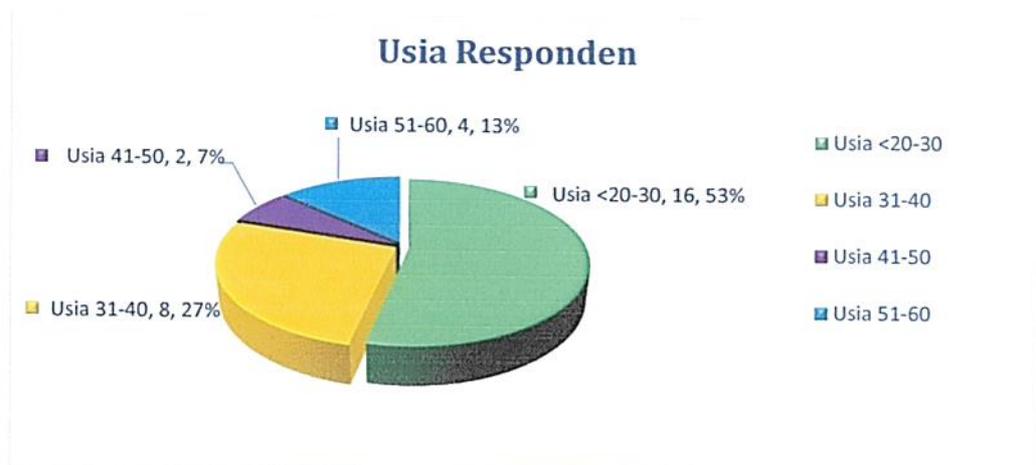
A. Data Responden.

Survei persepsi anti korupsi yang dilakukan adalah survei langsung kepada 30 responden yang merupakan para penerima layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dari bulan Januari s.d. Maret 2024 yang berpartisipasi mengisi kuesioner secara langsung dengan lengkap. Sebelum melakukan analisis terhadap hasil survei, akan disajikan gambaran data deskripsi responden. Deskripsi responden tersebut berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan responden. Jumlah responden yang turut ambil bagian dalam Survei Persepsi Anti Korupsi terhadap Tata Kelola Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, tersebut berdasar latar belakang jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan responden dapat dibagi sebagaimana dalam gambar tersebut di bawah ini. Berikut ini adalah hasil pie chart berdasarkan 30 responden:

1. Kelompok Usia Responden

Responden pengguna layanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara <20 tahun s/d 40 tahun. Bagi kelompok usia di atas 40 tahun, jumlah responden semakin mengecil.

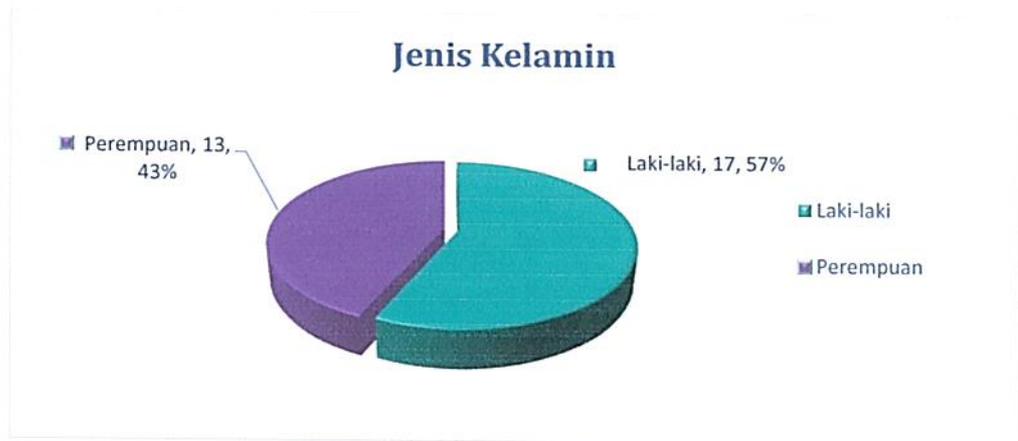
Gambar 1 Usia Responden



2. Kelompok Jenis Kelamin Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan diperoleh gambaran bahwa pengguna layanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sebanyak 17,57% adalah laki-laki dan 13,43% adalah perempuan.

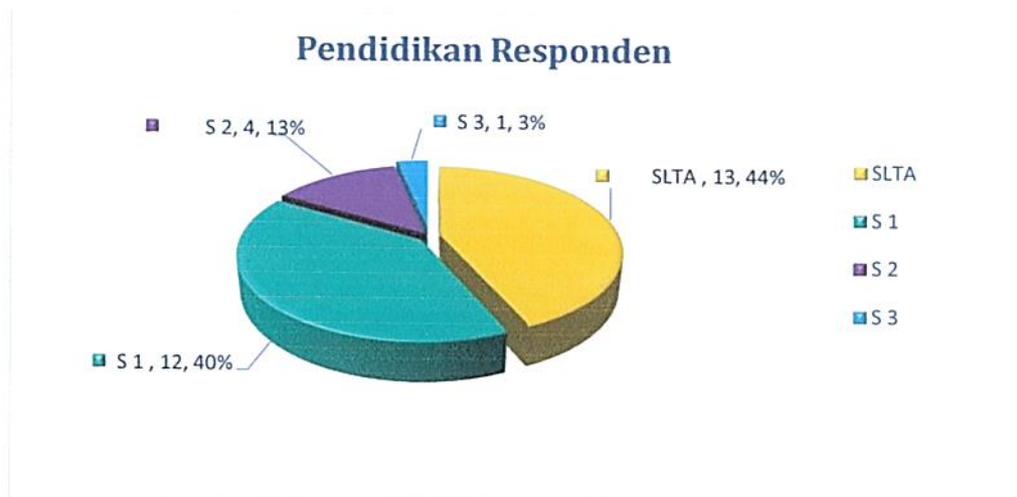
Gambar 2 Jenis Kelamin Responden



3. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan diperoleh gambaran bahwa pengguna layanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang berlatar belakang pendidikan terbanyak adalah SLTA sebesar 13,44%, selanjutnya S1 sebesar 12,40%, S2 sebesar 4,13% dan S3 sebesar 1,3%.

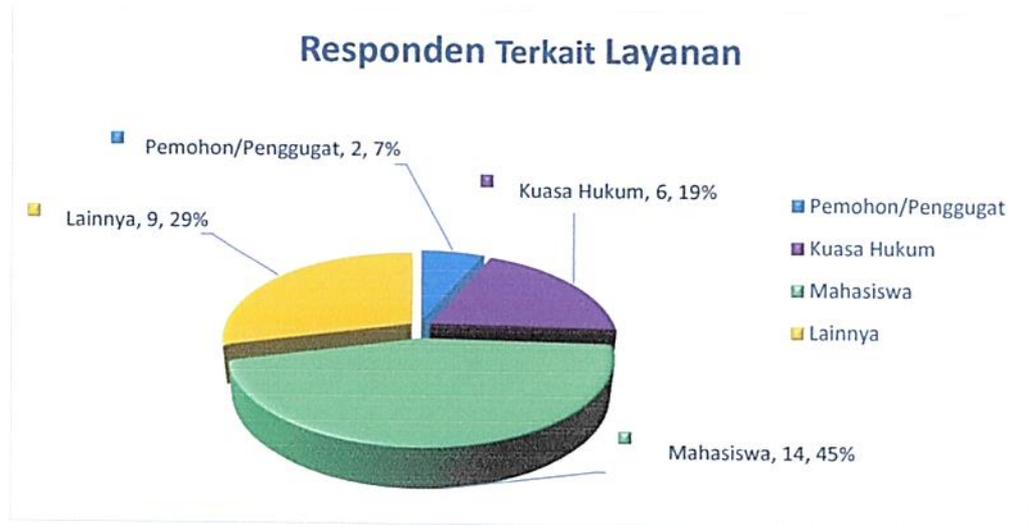
Gambar 3 Tingkat Pendidikan Responden



4. Kelompok Responden Terkait Layanan

Responden berdasarkan keterkaitan layanan terdiri dari Mahasiswa sebanyak 14,45%, Dosen dan lainnya sebanyak 9,29%, Pemohon/Penggugat sebanyak 2,7% dan Kuasa Hukum sebanyak 6,19%.

Gambar 4 Responden Terkait Layanan



B. Data Dukung Lainnya.

Data dukung dalam pelaksanaan survei persepsi kualitas pelayanan publik adalah Data Responden Valid.

LAMPIRAN

DATA RESPONDEN SPAK TRIWULAN I TAHUN 2024

Periode : Januari - Maret 2024

No.	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Layanan yang diterima	1	2	3	4	5
1	Yulianto Pamungkas, S.H.	31	Laki - laki	S1	Kuasa Hukum	Lainnya: Leges Gugatan	6	6	6	6	6
2	Nabilah Audesia	23	Perempuan	SLTA	Mahasiswa	Akademis	6	6	6	6	6
3	Dr. Dedy Muharman, S.H., M.Hum.	59	Laki - laki	S3	Dosen	Akademis	6	6	6	6	6
4	Titik Kusumawati	29	Perempuan	S2	Dosen	Akademis	6	6	6	6	6
5	Ragil Ira Mayasari, S.Pd., M.Sc.	34	Perempuan	S2	Dosen	Lainnya: Kunjungan PKL	6	6	5	5	5
6	Hascaria Budi P., S.H., M.H.	34	Laki - laki	S2	Dosen	Lainnya: Kunjungan PKL	6	6	6	6	6
7	Erwin Winarno	35	Laki - laki	S1	Dosen	Akademis	6	6	6	6	6
8	Yuni Lestari	50	Perempuan	S1	Pengggugat	Gugatan	6	6	6	6	6
9	Christna Harimurti	38	Laki - laki	S1	Kuasa Hukum	Gugatan	6	6	6	6	6
10	Thomas	23	Laki - laki	S1	Kuasa Hukum	Upaya Hukum	5	6	6	5	6
11	Likah	35	Perempuan	S1	Marketing	Lainnya: Penawaran Internet	6	6	6	6	6
12	Ika Dewi	21	Perempuan	SLTA	Mahasiswa	Akademis	6	6	6	6	6
13	Tantri Ekaningtyas	21	Perempuan	SLTA	Mahasiswa	Akademis	6	6	6	6	6
14	Tuson Dwi H.	31	Laki - laki	S1	Mahasiswa	Akademis	6	6	6	6	6
15	Danang	37	Laki - laki	SLTA	Pengggugat	Gugatan	5	5	5	5	5
16	Sarmita, S.H.	41	Laki - laki	S1	Kuasa Hukum	Gugatan	5	5	6	6	6
17	Sarjita	56	Laki - laki	S2	Dosen	Saksi Ahli	6	6	6	6	6
18	Kunthi Mawar Pratiwi	22	Perempuan	S1	Mahasiswa	Akademis	6	6	6	6	6
19	Yuni Lestari	27	Perempuan	S1	Dosen	Akademis	6	6	6	6	6
20	Muhammad Bilal Ramadhan	21	Laki - laki	SLTA	Mahasiswa	Akademis	6	6	6	6	6
21	Muh. Nathan Shahrulnezam	20	Laki - laki	SLTA	Mahasiswa	Akademis	5	6	5	5	6
22	Reynaldi	20	Laki - laki	SLTA	Mahasiswa	Akademis	6	6	6	6	6
23	Rafli Saputra	20	Laki - laki	SLTA	Mahasiswa	Akademis	5	5	6	6	5
24	Dian Fadiya S.	20	Perempuan	SLTA	Mahasiswa	Akademis	6	6	6	6	6
25	Jodi Bawono Mukti	20	Laki - laki	SLTA	Mahasiswa	Akademis	6	6	6	6	6
26	Purnomo Wibowo	53	Laki - laki	S1	Kuasa Hukum	Gugatan	6	6	5	6	6
27	Siti Roswati	56	Perempuan	S1	Kuasa Hukum	Permohonan	5	6	6	6	6
28	Andreas Prayoga	20	Laki - laki	SLTA	Mahasiswa	Akademis	6	6	6	6	6
29	Maharani Dian A	22	Perempuan	SLTA	Mahasiswa	Akademis	6	6	6	6	6
30	Alivita Hartanti	22	Perempuan	SLTA	Mahasiswa	Lainnya	6	6	6	6	6